

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
DENGAN *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



NAMA : Zakia Arisandi

NIM : 22 2012 077

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
DENGAN *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



NAMA : Zakia Arisandi

NIM : 22 2012 077

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zakia Arisandi
NIM : 22 2012 077
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah dibuat dan ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan jiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi dengan segala konsekuensianya

Palembang, 2016

Penulis



Zakia Arisandi

**Fakultas Ekonomidan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Belanja Dengan *Value For Money* Pada Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan
Sumber Daya Air**
Nama : Zakia Arisandi
NIM : 22 2012 077
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

**Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 2016**

Rebimbing



(Mizan, S.E., M.SI, Ak., CA)
NIDN/NBM: 020647101/859196

Mengetahui

**Dekan
U.b-Ketua Program Studi Akuntansi**



(Betri Sirajuddin, S.E., M.SI, Ak., CA)
NIDN/NBM : 0216106902/944806



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil A'lamin puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan *Value For Money* Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan harapan dapat bermanfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Segala Puji bagi Allah SWT Robb ku yang maha segala-galanya berkat karunia, rahmat, kasih dan ridho-Nya, yang telah memberikan jalan dan kemudahan serta kelancaran penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya teruntuk Bunda ku Harus Fadillah yang selalu mendoakan setiap langkahku dan Ayahku Hasan Zaini yang telah mendidik, membiayai dan karena penulisan skripsi ini tidak akan pernah terjadi dan terselesaikan tanpa adanya ridho dan bimbingan dari kedua orang tuaku. serta penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Mizan,S.E.,AK.,M.Si.,CA sebagai orangtua yang telah membimbing dan meluangkan waktu dalam memberikan pengarahannya dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta semua dosen dan guru ku yang telah memberikan ilmu untukku. Selain itu disampaikan juga ucapan

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, S.E., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. BAPAK Fauzi Ridwan, S.E., S.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan S.E., M.Si, Ak, CA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mizan S.E., M.Si, Ak, CA selaku Pembimbing seperti ayahku terimakasih atas seluruh pemikiran, tenaga, waktu, masukan, dan kritik kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.
6. Bapak M. Basyaruddin. R S.E., M.Si, Ak selaku pembimbing akademik.
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bundaku tercinta Harus Fadilla dan ayahanda Hasan Zaini yang selalu berdoa dan memberikan dukungan dengan tiada henti-hentinya untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Dua belas saudara-saudaraku yang telah memberi semangat serta kasih sayang yang besar dan luarbiasa kepada penulis.
10. Sahabat ku Mitha Oktarina dan Wenti Anggraini yang telah memberi semangat kepada penulis.

11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Sekretaris , Kasubag Keuangan dan seluruh Staf PU Bina Marga dan PSDA Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Bank Indonesia yang telah menerima sebagai anggota surveyor sehingga dapat meringankan beban dalam pembiayaan pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian. Akhirukalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang, Maret2016
Penulis,

(Zakia Arisandi)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN / COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BABII KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	9
B. Landasan Teori	13
1. Anggaran	13
a. Pengertian Retribusi Daerah.....	13
b. Fungsi Anggaran.....	14
c. Jenis-jenis Anggaran.....	19
d. Karakteristik Anggaran.....	22
e. Prinsip-prinsip Anggaran.....	23
f. Pentingnya Anggaran Sektor Publik.....	25

2.	Belanja.....	26
3.	Kinerja.....	27
	a. Pengertian Kinerja	27
	b. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	28
	c. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	29
	d. Siklus Pengukuran Kinerja	31
	e. Tahap-tahap Pengukuran Kinerja	32
	f. Prinsip-prinsip Pengukuran Kinerja	33
	g. Metode Pengukuran Kinerja.....	34
4.	<i>Value For Money</i>	35
	a. Pengertian <i>Value For Money</i>	35
	b. Konsep <i>Value For Money</i>	36
	c. Manfaat <i>Value For Money</i>	37
	d. Pengukuran <i>Value For Money</i>	38
	e. Teknik <i>Value For Money</i>	38

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	45
B.	Lokasi Penelitian	46
C.	Operasionalisasi Variabel.....	46
D.	Data Yang Diperlukan.....	47
E.	Metode Pengumpulan Data	48
F.	Analisis Data dan Teknik Analisis	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian.....	51
	1. Sejarah Singkat Dinas PU Bina Marga	51
	2. Visi dan Misi Dinas PU Bina Marga.....	52
	3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	53
	a. Struktur Organisasi	53
	b. Pembagian Tugas.....	55
B.	Pembahasan	72

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA Kota Palembang Tahun 2012-2014.....	4
Tabel I.2	Laporan Program/Kegiatan yang Tidak Terealisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA Tahun 2012-2014.....	5
Tabel II.1	Hasil Persamaan dan Perbedaan.....	12
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	46
Tabel IV.1	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang Tahun 2012-2014	72
Tabel IV.2	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang Tahun 2012-2014	73
Tabel IV.3	Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang Tahun 2012-2014.....	79
Tabel IV.4	Pengukuran Tingkat Efisiensi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang Tahun 2012-2014	86
Tabel IV.5	Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang Tahun 2012-2014.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang.....	54
--	----

Lampiran

Lampiran 1	Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian
Lampiran 2	Fotocopy Surat Izin Mengikuti Seminar Usulan Penelitian
Lampiran 3	Surat Berita Acara Seminar Usulan Penelitian
Lampiran 4	Fotocopy Daftar Hadir Seminar Usulan Penelitian
Lampiran 5	Fotocopy Sertifikat KKN
Lampiran 6	Fotocopy sertifikat Toeefl
Lampiran 7	Fotocopy Sertifikat Hapalan AIK
Lampiran 8	Fotocopy Aktifitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 9	Biodata Penulis

ABSTRAK

Zakia Arisandi/222012077/2016/Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan *Value For Money* Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang anggaran belanja jika diukur dengan *Value For Money* tahun 2012 sampai dengan 2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan sistem penerimaan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek di kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *value for money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun 2012-2014 sudah ekonomis, pada tahun 2012 sudah efisien namun pada tahun 2013-2014 belum berjalan dengan baik karena kurang efisien dan efektif.

Kata Kunci : *Value for money*, Anggaran belanja

ABSTRACK

Zakia Arisandi / 222012077/2016 / Accounting / Analysis System Improvement Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang.

ormulation of the problem in this study is whether the efforts that must be made in the Rorder to increase acceptance of retribution route permits in the city of Palembang. This type of research used in this research is descriptive research that aims to know the efforts that must be made in order to improve reception systems levies to raise revenue levy route permits in the city of Palembang . The data used in this study are primary data and secondary data . Data collection methods used in this study were interviews and documentation . Analysis of the data used in this study is a qualitative and quantitative analysis . Analytical results from this study can be concluded that efforts should be made by the government to raise revenue levy route permit is doing expansion of revenue base that consists of evaluating the tariff on route permits , revalued over the object levies . Appraisers need to pay attention back to the subject of scrutiny and revaluation of the reassessment of the service . Efforts must be taken by the government is control over revenue leakage by way of audits , improve the system of the reception area , and provide adequate rewards to people who are obedient to pay the levy and impose sanctions for noncompliance . As well as Increase Efficiency Revenue Administration .

keyword:*value for money, budget execution.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan berkaitan dengan pengguna sumber daya publik kepada pemberi mandat. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah, dimana kebijakan pengelolaan keuangan daerah mempunyai sasaran agar pengeluaran pemerintah dapat mengidentifikasi dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran.

Keberhasilan suatu organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata-mata dari persepektif keuangan. *Surplus atau defisit* dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya.

Mahsun (2009: 25) mengemukakan bahwa kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.

Hal ini juga konsisten dengan pendekatan anggaran kinerja yang digunakan. Sebuah anggaran yang dibuat tidak hanya berisi angka, tetapi juga berisi target kinerja kualitatif. Karena itu, aspek pertanggungjawabannya tentu tidak cukup hanya berupa laporan keuangan tetapi juga harus dilengkapi dengan laporan kinerja.

Nordiawan (2008: 48) mengemukakan bahwa Anggaran dinyatakan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financial. Mardiasmo (2003: 62) mengemukakan bahwa Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Dalam proses penganggaran dan evaluasinya, organisasi sektor publik, khususnya pemerintah selalu terfokus pada pengukuran *input* (*mean measure*), bukan pengukuran *outcome* (*end measure*). Pengukuran demikian hanya befokus pada penjelasan aktivitas-aktivitas organisasi, tetapi tidak menjelaskan dampak program-program pembangunan terhadap masyarakat. Hal itu berarti pengukuran *input* tidak penting bagi pemerintah. Pemerintah perlu mengukur *input*, misalnya banyaknya anggaran yang dibelanjakan dan apa yang telah dilakukan. Namun demikian, apablia pengukuran kinerja hanya berfokus pada *input* dan *ouput* (anggaran dan realisasinya), bukan *outcome*, manfaat, dan dampak terhadap

masyarakat, maka organisasi sektor publik tidak akan mampu melihat keberadaannya sendiri bahwa ia ada untuk melayani masyarakat.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja di organisasi sektor publik bukanlah hal mudah. Salah satunya disebabkan oleh tidak adanya sebuah teknik atau cara yang baku untuk melakukannya.

Pengukuran kinerja dengan *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis yaitu perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah, Terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Konsep ekonomis memastikan biaya *input* yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. Tingkat ekonomis diukur dengan membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran instansi tersebut.

Efisiensi yaitu pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Konsep efisiensi memastikan bahwa *output* yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia.

Standar Kinerja atau target yang telah ditetapkan juga diperlukan efektivitas. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Konsep efektivitas berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat. Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatannya. Mardiasmo (2009: 4) mengemukakan bahwa *Output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Pengertian *outcome* adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam sektor publik dalam bidang jasa dan konstruksi. Organisasi sektor publik sudah mengalami tekanan untuk lebih *efisiensi*, memperhitungkan biaya ekonomi dan dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan karena akan berdampak pada pengeluaran yang cukup besar dalam anggaran belanja rutin. Laporan anggaran dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang dapat dilihat di tabel I.1

Tabel I.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan PSDA
2012-2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2012	103.338.311.106,74	92.068.325.843	89,09
2013	271.146.845.846	255.145.885.601	94,10
2014	247.447.150.258,68	225.618.178.845	91,18

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, 2016

Tabel diatas menunjukkan anggaran dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014 realisasinya mengalami

kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2012 realisasi belanja lebih rendah dibandingkan anggaran belanja yaitu 89,09%, selanjutnya pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 91,18%. Anggaran dan realisasi belanja tidak pernah mencapai target kinerja yang sudah ditentukan yaitu 100% ini dapat menunjukkan bahwa kurang efektifnya pencapaian target anggaran dan realisasi belanja tersebut.

Tabel I.2
Laporan Program/Kegiatan yang Tidak Terealisasi
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA Kota Palembang
Tahun 2012-2014

Tahun	Nama Program/Kegiatan	Realisasi
2012	Pengadaan Kontruksi Jalan - Perbaikan Jalan	442.654.362
2013	Pengadaan Kontruksi Jembatan - Pengadaan Kontruksi Jembatan Penyberangan orang	7.482.600
2014	Pengadaan Kontruksi Jalan - Perbaikan jalan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air - Pengadaan Kontruksi Pintu Air	29.774.250 108.198.875.750

Sumber: Dinas P.U Bina Marga dan PSDA Kota Palembang, 2016

Tabel diatas menunjukkan program/kegiatan yang tidak trealisasi tahun 2012, 2013, dan 2014. Pada tahun 2012 program pengadaan kontruksi jalan yang tidak terealisasi.yaitu perbaikan jalan sebesar Rp. 442.654.362.000 . Pada tahun 2012 program Pengadaan Kontruksi Jembatan yang tidak terealisasi yaitu pengadaan kontruksi jembatan penyeberangan orang sebesar Rp 7.482.600.000. Pada tahun

2014 program Pengadaan Kontruksi Jalan yang tidak terealisasi perbaikan jalan sebesar Rp 29.774.250.000 Pengadaan Kontruksi Jaringan Air yang tidak terealisasi yaitu Pengadaan Kontruksi Pintu Air sebesar Rp 108.198.875.750

Realisasi anggaran program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang disetiap tahunnya rata-rata sudah terealisasi hanya ada beberapa program/kegiatan saja yang tidak terealisasi dan yang paling banyak yaitu di tahun 2014 ada dua program/ kegiatan yang tidak terealisasi atau tidak mencapai target kinerja yang sudah ditentukan dan ini dapat menunjukkan bahwa kurang efektifitasnya pencapaian program/kegiatan tersebut.

Pengukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang menggunakan tolak ukur utamanya adalah anggaran. Maka dari itu penulis akan menganalisis laporan keuangan dengan *value for money* dalam mengontrol keuangan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan *Value For Money* Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini ialah: Bagaimanakah kinerja pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang jika diukur dengan *Value For Money* tahun 2012 sampai dengan 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan *Value For Money* tahun 2012 sampai dengan 2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai akuntansi sektor publik, serta untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai masalah kinerja dengan menggunakan *Value For Money*.

2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi instansi yang ada pada bagian keuangannya

dalam pengukuran kinerja dengan menggunakan *Value For Money* sehingga dapat gambaran tentang ekonomis, efisien, dan efektivitas.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa akuntansi sebagai bahan acuan untuk peneliti di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Tri (2007) yang berjudul Analisis Penerapan *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengukuran kinerja *financial* jika dinilai menggunakan *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja *finansial* pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan konsep *value for money* cukup ekonomi, efisien, dan efektif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu: data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode tahun 2002 sampai 2004. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *value for money* (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).

Teknik analisis adalah metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif, serta melakukan pengujian hipotesis. Hasil penelitian adalah jika dilihat berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2001 sampai 2004 cukup ekonomi, efisien, dan efektif, jika dilihat berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan

menggunakan konsep *value for money*, maka kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup ekonomi, dan efisien, tetapi tidak efektif

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ariel (2013) yang berjudul Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Minahasa Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deksriptif. Hasil tingkat dan kriteria efektifitas pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2010 dan yang terendah terjadi pada tahun 2012. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 sampai 2011, dikategorikan efisien.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rusita (2015) yang berjudul Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung periode 2011-2014 di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif. Hasil penelitian adalah dalam benja langsung tingkat efisiensi dari tahun 2011 – 2014 sudah efisien dalam penggunaan dana (anggaran) yang rendah denga harapan pada setiap proram dalam kegiatan

yang dijalankan bermanfaat semakin baik. Pencapaian belanja langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam tingkat efektifitas pada tahun 2011 – 2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut.

Ketiga penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel II.1
Hasil Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

NO	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Tri (2007) Penerapan <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil penelitian dilaksanakan di Biro Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan cukup ekonomi, Efisien, dan efektivitas.	Persamaan data yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan data sekunder Perbedaannya terletak pada Objek Penelitian, Objek sebelumnya dilakukan pada Dinas Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta sedangkan Penelitian Sekarang Pada Dinas PU Bina Marga dan PSDA Kota Palembang.
2.	Ariel (2013) Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Minahasa Selatan	Hasil penelitian Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2010 dan yang terendah terjadi pada tahun 2012. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 sampai 2011, dikategorikan efisien.	Persamaan data yang digunakan adalah data sekunder dan wawancara. Perbedaannya teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio efektifitas dan efisien, sedangkan yang digunakan peneliti adalah <i>value for money</i> (ekonomis, efisien dan efektifitas).
3.	Rusita (2015) Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang	Hasil penelitian pada Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah efisien, dan efektif.	Persamaan dengan penelitian sebelumnya data yang digunakan adalah data sekunder Perbedaannya teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio efektifitas dan efisien, sedangkan yang digunakan peneliti adalah <i>value for money</i> (ekonomis, efisien dan efektifitas).

Sumber : Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Indra (2010: 191) mengemukakan bahwa Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan.

Nordiawan (2008:48) mengemukakan bahwa anggaran dinyatakan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran *financial*. Mardiasmo (2003: 62) mengemukakan bahwa Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

- 1) Berapa biaya yang atas rencana-rencana dibuat
- 2) Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran suatu rencana instansi pemerintahan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

b. Fungsi anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009: 63-66) mengemukakan bahwa Anggaran sektor *public* mempunyai beberapa fungsi utama

- 1) Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang akan diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a) Merupakan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
 - c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
 - d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
- 2) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuatan) eksekutif.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *over spending*, *under spending*, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitori kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan empat cara, yaitu

- a) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
- b) Menghitung selisih anggaran

c) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians

d) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

3) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran sebagai alat politik (*Politik Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*. *Coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kreditibilitas pemerintah.

5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam poses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6) Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dan *budget holder* kepada pemberi wewenang legislatif. Kinerja esekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengetahuan pengendalian dan penilaian kinerja.

7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8) Anggaran Sebagai Alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, *vandalisme*, dan sebagainya.

Indra (2010: 192) megemukakan bahwa Anggaran publik berfungsi sebagai berikut:

- 1) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja
- 2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang.
- 3) Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan serta bawahan
- 4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
- 5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi

- 6) Anggaran merupakan instrumen politik
- 7) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

c. Jenis-jenis Anggaran

Nordiawan (2010: 71-72) mengemukakan bahwa Secara garis besar anggaran dapat diklasifikasikan menjadi berikut:

1) Anggaran operasional dan anggaran modal (*current vs capital budget*)

Berdasarkan jenis aktivitya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga sering dikelompokan sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya.

2) Anggaran berdasarkan pengesahan

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif dan anggaran *enacted*. Anggaran tentatif adalah anggaran yang

tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, anggaran enacted adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

3) Anggaran dana umum vs anggaran dana khusus

Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) dibagi menjadi dana umum dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus dicadangkan/ dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu. Anggaran untuk dana umum disebut anggaran dana umum (*general budget*) dan anggaran untuk dana khusus disebut anggaran dana khusus (*special budget*).

4) Anggaran tetap vs anggaran fleksibel

Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, harga barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun, jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfiktual bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

5) Anggaran eksekutif vs anggaran legislatif

Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif, yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, serta anggaran legislatif, yaitu anggaran yang

disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga yang disebut anggaran bersama, yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara itu, sebuah anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus disebut anggaran komite.

Mardiasmo (2009: 66) mengemukakan bahwa jenis-jenis Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua yaitu:

1) Anggaran operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.

2) Anggaran modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/ modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses pemilihan umum. Politisi mentransmisikan mandat tersebut dalam bentuk kebijakan publik dan program yang memberi manfaat bagi pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai *trade-off*, sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar publik.

d. Karakteristik Anggaran Sektor publik

Indra (2010: 192) mengemukakan bahwa Karakteristik anggaran publik terdiri dari:

- a) Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
- b) Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
- c) Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

- d) Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- e) Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

e. Prinsip-prinsip Penganggaran

Mardiasmo (2009: 67-68) mengemukakan bahwa Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

1) Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2) Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3) Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4) *Nondiscretionary appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5) Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6) Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

7) Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

8) Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Menurut Indra (2010: 193) Prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1) Demokratis

Mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif

2) Adil

Berarti bahwa anggaran harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proposional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

3) Transparan

Proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum.

4) Bermoral tinggi

Berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.

5) Berhati-hati

Berarti pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi

6) Akuntabel

Berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat.

f. Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2002: 62-63) mengemukakan bahwa Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu:

- 1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintahan untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat.

2. Belanja

Hafiz (2009:200) mengemukakan bahwa Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja merupakan pengeluaran daerah yang mengurangi ekuitas atau kekayaan daerah dan tidak dapat diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

a. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai sebagaimana mestinya untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai pemanfaatannya kurang dari 12 bulan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja Modal

Belanja Modal sebagaimana mestinya digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian dan pengadaan barang dan nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Indra (2006: 274) mengemukakan bahwa Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategi (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tersebut harus dicatat dan diukur,

pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada *input* (masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.

Basri dan Rivai (2007: 113) mengemukakan bahwa kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan pertanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan. Mahsun (2009: 25) mengemukakan bahwa kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.

Jadi kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2009: 122) mengemukakan bahwa tujuan sistem pengukuran kinerja antara lain:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).

- 2) Untuk mengukur kinerja *financial* dan *non financial* secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- 3) Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manager level menengah bawah serta motivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut Deddy (2010:158-159) Tujuan Pengukuran Kinerja yaitu:

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- 3) Memerbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
- 5) Memotivasi pegawai.
- 6) Menciptakan akuntabilitas publik.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2009: 122) mengemukakan bahwa manfaat pengukuran kinerja adalah:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Indra (2006: 275) mengemukakan bahwa Pengukuran kinerja sangat penting perannya sebagai alat manajemen untuk:

- 1) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- 2) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
- 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

- 5) Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan (masyarakat) sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- 9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- 10) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan manfaat-manfaat tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai landasan untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi butir-butir kekuatan untuk mengembangkan kinerja di masa mendatang, serta mengidentifikasi butir-butir kelemahan sebagai sarana koreksi dan pengembangan.

d. Siklus Pengukuran Kinerja

Indra (2006: 281) mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) tahap untuk melakukan pengukuran kinerja yaitu:

- 1) Perencanaan Strategi

Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan strategi, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas.

- 2) Penetapan Indikator Kinerja

Setelah perumusan strategi instansi pemerintah perlu menyusun dan menetapkan ukuran indikator kinerja dan beberapa jenis program, tahapan ini mungkin mudah dan sederhana untuk diidentifikasi indikator kinerja dapat berupa indikator *input*, *process*, *output*, *outcomes*, *benefit*, dan *impact*. Indikator ukuran yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung.

3) Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja

Ada tiga kegiatan dalam tahap ini, pertama, harus yakin bahwa mempunyai data atau pencarian data yang diperlukan terus dilanjutkan sesuai siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja harus mengumpulkan data. Ketiga, menggunakan data pengukuran kinerja yang disimpan, dalam hal ini harus dengan cara yang dapat dimengerti.

4) Penyempurnaan Ukuran

Pada tahap ini. Pemikiran atas indikator hasil (*outcomes*) dan indikator dampak (*impact*) menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran atas indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*).

5) Pengintegrasian dengan proses manajemen

Pada tahap ukuran kinerja tersedia tantangan selanjutnya adalah mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan proses manajemen.

e. Tahap pengukuran Kinerja

Mulyadi (2007: 337) menyatakan bahwa terdapat tiga tahap dalam melakukan pengukuran kinerja yaitu:

1) Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian *indicator* kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2) Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau data eksternal.

3) Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan yaitu:

- a) Membandingkan antara rencana dan realisasinya.
- b) Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c) Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggap terbaik dalam bidangnya (*benchmarking*).
- d) Membandingkan antara realisasi dengan standar.

f. Prinsip-prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja

Indra (2006: 276) mengemukakan bahwa Pemilihan ukuran kinerja untuk instansi mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kembali ukuran yang ada dan dievaluasi secara rutin.
Apabila sudah tidak berguna, maka alasan yang terkait dengan kenyamanan manajemen perlu dikemukakan. Mengukur kegiatan yang penting, tidak hanya hasil secara keseluruhan.
- 2) Pengukuran harus memotivasi tim kerja untuk mencapai tujuan (*gooldriven teamwork*).
- 3) Pembagian proses pengukuran disesuaikan dengan mekanisme tim kerja. Apabila tim bekerja dalam rangka pencapaian tujuan, maka pengukuran lebih pada proses pencapaian tujuan.
- 4) Proses merupakan perangkat yang terintegrasi dengan strategi organisasi.
- 5) Sistem pengukuran harus terintegrasi dengan strategi organisasi.
- 6) Sistem pengukuran akan memonitor, meminimalisasi biaya, peningkatan kualitas, pengukuran waktu pelaksanaan produksi, dan penciptaan pengembalian investasi yang wajar.
- 7) Proses pengukuran harus melibatkan akuntabilitas publik.

g. Metode Pengukuran Kinerja

Ada beberapa metode yang digunakan sebagai alat dalam pengukuran kinerja salah satunya dengan menggunakan *balanced scorecard* (BSC) dan *Value For Money* atau 3E (Ekonomi, Efisien, dan Efektivitas).

4. *Value For Money*

a. *Pengertian Value For Money*

Indra (2006: 280) mengemukakan bahwa *value for money* merupakan tolak ukur dalam anggaran belanja organisasi sektor publik. Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip utama dalam menyelenggarakan anggaran belanja agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan kesejahteraan yang maksimal.

Mardiasmo (2009: 127) mengemukakan bahwa *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama.

Mahsun (2006: 132) mengemukakan bahwa *value for money* adalah pengukuran kinerja berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Secara umum *value for money* adalah penerapan ketiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomis berkaitan dengan pemilihan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling rendah. Jadi *Value For Money* merupakan tolak ukur dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah yang berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisien, dan efektivitas.

b. Konsep *Value For Money*

Haryanto (2007: 6) mengemukakan bahwa *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Mardiasmo (2009: 130) mengemukakan bahwa elemen pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik yang meliputi: ekonomis, efisiensi, efektivitas dan *outcome*. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektivitas (berhasil guna) mencapai tujuan dan sasaran.

Mardiasmo (2009: 5) mengemukakan bahwa adapun definisi *input*, *output*, dan *outcome* adalah:

- 1) *Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.
- 2) *Output* merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program, dan aktivitas.
- 3) Sasaran antara (*Throughput*) merupakan analisis *value for money* memerlukan data *input* dan data *output* yang memadai karena *value for money* mempunyai kaitan erat dengan pengukuran *input* dan *output*.
- 4) *Outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

c. Manfaat *Value For Money*

Haryanto, (2007: 6-7) mengemukakan bahwa manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain:

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena kehilangan inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.
- 4) Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Halim (2006: 186) mengemukakan bahwa konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan manfaat berupa:

- a) Meningkatnya efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- b) Meningkatnya mutu pelayanan publik.
- c) Menurunkan biaya pelayanan publik karena kehilangan inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.
- d) Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik.

d. Pengukuran *Value For Money*

Mardiasmo (2009: 132) mengemukakan bahwa ketiga pokok dalam bahasan *value for money* sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Ekonomis mengenai masukan, efisiensi membahas mengenai masukan dan keluaran, dan efektivitas membahas mengenai keluaran dan dampak.

e. Teknik Pengukuran Kinerja

Mahsun (2009: 181) mengemukakan bahwa Metode yang digunakan sebagai alat dalam pengukuran kinerja menurut salah satunya dengan menggunakan *value for money* atau 3E.

1) Ekonomis

Ekonomi (hemat) sering disebut kehambatan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau hemat (*I'rudency*) dan tidak ada pemborosan. suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tak perlu. Mengukur tingkat kehematan dari pengetahuan-pengetahuan yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomis:

$$\text{Tingkat Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100 \%$$

Kriteria ekonomis adalah:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti ekonomis.
 - b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti ekonomis berimbang
 - c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti tidak ekonomis
- 2) Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat produktivitas, Pengukuran efisiensi (berdaya guna) dilakukan menggunakan Perbandingan antara output yang dihasilkan dengan digunakan (*cash of output*). Proses kegiatan operasional ini dapat dikatakan efisiensi apabila produk yang dihasilkan atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*), jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomis karena keduanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*) Pengukuran tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat output nya memerlukan data-data realisasi biaya untuk mengukur tingkat efisiensi.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi adalah:

- a) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka anggaran belanja berarti dikatakan tidak efisiensi.
 - b) Jika diperoleh nilai antara 90% - 100% maka anggaran belanja berarti dikatakan kurang efisiensi.
 - c) Jika diperoleh nilai antara 80% - 90% maka anggaran belanja berarti dikatakan cukup efisiensi.
 - d) Jika diperoleh nilai antara 60% - 80% maka anggaran belanja berarti dikatakan efisiensi.
 - e) Jika diperoleh nilai dibawah 60% maka anggaran belanja berarti dikatakan sangat efisiensi.
- 3) Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai sasaran atau tujuan akhir kebijakan.

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas adalah:

- a) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka anggaran belanja berarti dikatakan sangat efektif.
- b) Jika diperoleh nilai antara 90% - 100% maka anggaran belanja berarti dikatakan efektif.
- c) Jika diperoleh nilai antara 80% - 90% maka anggaran belanja berarti dikatakan cukup efektif.
- d) Jika diperoleh nilai antara 60% - 80% maka anggaran belanja berarti dikatakan kurang efektif.
- e) Jika diperoleh nilai dibawah 60% maka anggaran belanja berarti dikatakan tidak efektif.

g. Outcome

Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya dari output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya. Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran *retrospektif* dan *prospektif*. Peran *retrospektif* berhubungan dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan *prospektif* terkait dengan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang.

Indra (2005: 77) mengemukakan bahwa Pengukuran kinerja menurut salah satunya dengan menggunakan value for money atau 3E.

1) Efisiensi

Suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar angkanya semakin tinggi tingkat efisiensinya. Apabila hasil rasionya leboh besar dari satu dan dibandingkan dengan hasil program yang sama, maka program tersebut bisa disebut lebih efisien. Dengan rumusan rasio sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{OUTPUT}}{\text{INPUT}}$$

2) Efektivitas

Efektifitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Jika suatu organisasi bertujuan membangun sebuah rumah sakit dengan 250 tempat, 4 unit operasi, sebuah departemen kecelakaan dan darurat, serta departemen pasien luar dan semua target tersebut tercapa, maka mekanisme kerja organisasi tersebut efektif. Apabila hanya 150 tempat tidur terbangun , maka organisasi tersebut tidak bekerja efektif.

3) Ekonomis

Ekonomis merupakan indikator tentang penggunaan input yaitu apakah suatu pembangunan melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.

Deddi (2010:160-161) mengemukakan bahwa Pengukuran kinerja dapat diukur dengan *value for money* yaitu indikator ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

1) Ekonomi

Konsep ekonomi terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi berarti sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Ekonomis dapat dianalisis dengan membandingkan input sekunder pada input jumlah input primer yang dibutuhkan.

2) Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

3) Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/ kebijakan di mana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap

pencapaian tujuan, amak semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (*hasil*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2013: 53-55) menyatakan bahwa berdasarkan tingkat eksplanasinya adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Berdasarkan hal ini, penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dari satu variabel.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh data yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi pada tempat melakukan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA yang beralamat Jalan Slamet Riyadi No. 213 Kelurahan:lawang kidul kecamatan:Ilir Timur II Kota Palembang. Telp. (0711) 710033-710305 Fax. (0711)710033.

C. Operasionalisasi Variabel

Sugiyono (2012: 49) mengemukakan bahwa operasionalisasi variabel adalah definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur, kemudian ditarik kesimpulan. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengukuran kinerja dengan Value For Money	Suatu proses penilaian yang dilakukan untuk kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui alat ukur yang berdasarkan tingkat ekonomis, efisien dan efektivitas	1. Ekonomi - Realisasi Pengeluaran - Anggaran Pengeluaran 2. Efisien - Realisasi Anggaran Belanja Langsung - Realisasi Anggaran Belanja 3. Efektivitas - Realisasi Belanja - Target Anggaran Belanja 4. Outcome

Sumber : Penulis, 2016

D. Data yang Diperlukan

Husein (2008: 42) menyatakan bahwa data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti dari hasil wawancara atau pengisian kusioner yang dilakukan peneliti. (tidak melalui perantara).

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primr yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk diagram dan tabel, serta dapat juga dikatakan data yang diperoleh tidak secara langsung yang melalui media perantara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara, yaitu bentuk komunikasi langsung yang dilakukan peneliti dengan Kasubag Keuangan, data sekunder yaitu berupa:

1. Sejarah singkat Dinas PU. Bina Marga dan PSDA Kota Palembang
2. Srtruktur Organisasi Dinas PU. Bina Marga dan PSDA Kota Palembang Tahun 2015
3. Data target dan realisasi anggaran belanja Dinas PU Bina Marga dan PSDA Kota Palembang tahun 2012-2014
4. Data target dan realisasi anggaran kegiatan Dinas PU Bina Marga dan PSDA Kota Palembang tahun 2012-2014

E. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2013: 402-425) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa tulisan, gambar, dan karya-karya monumental.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa data anggaran dan realisasi 2012-2014 Dinas PU Bina Marga dan PSDA

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Mudrajad (2013: 145) mengemukakan bahwa analisis data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam menganalisis data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan data analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yaitu menghitung menganalisis kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA Kota Palembang kemudian, analisis kualitatif yaitu digunakan penilaian dari hasil perhitungan.

2. Teknis analisis

a) Ekonomis:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

b) Efisiensi

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

c) Efektivitas

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Palembang dibentuk berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang APBN UU No.17 tahun 2003. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinya.

Untuk menyelenggarakan tugas ersebut dalam Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang mempunyai tugas sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang penjabaran Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pmempuntai fungsi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi umum, Perencanaan program, Kepegawaian dan Keuangan.
- b. Pemberian perizinan dan Pelayanan Teknis Pembangunan di Bidang Jalan, dan Jembatan.

- c. Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Teknis di Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas dalam lingkungan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang

- a. Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang

Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Terwujudnya Infrastruktur Kebinamargaan, Drainase, dan Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Handal, Berkualitas untuk mendukung Palembang Emas.

- b. Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang

Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang

ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan infrastruktur jalan, drainase, dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

- 2) Menciptakan pelayanan profesional bidang Bina Marga, drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

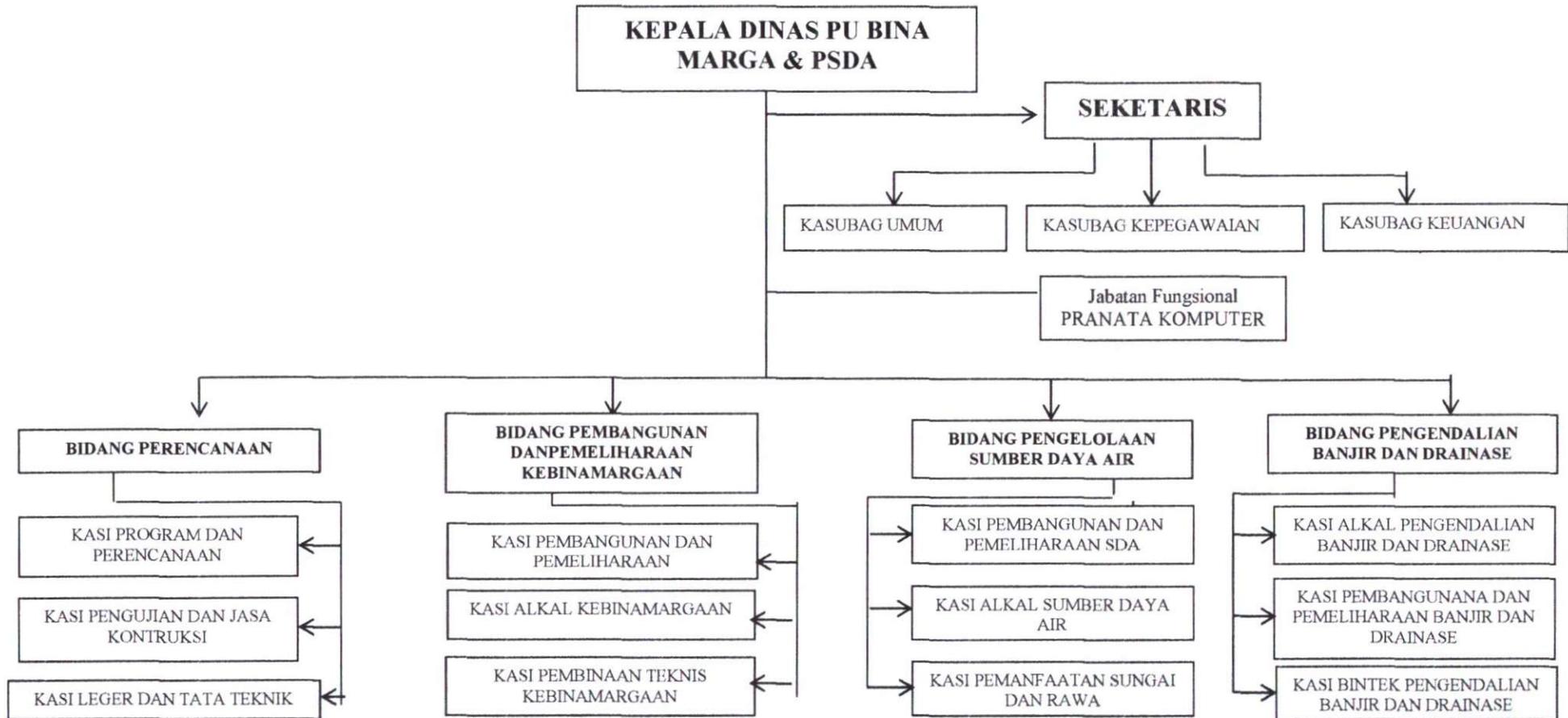
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Palembang adalah Dinas yang menjadi ujung tombak yang bertugas dalam pembangunan infrastruktur pelayanan publik, meningkatkan roda perekonomian masyarakat dalam mewujudkan akses pembukaan ruang infrastruktur lainnya yang bersama Dinas lainnya.

Berikut adalah struktur organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Palembang, 2015

b. Pembagian Tugas dan Tanggung jawab

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan dibidang pekerjaan umum bina marga dan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas juga menyelenggarakan fungsi:

- a) Memimpin kegiatan Dinas dan urusan kesekretariatan serta bidang yang ada dalam lingkungannya.
- b) Penyusunan visi, misi dan rena strategis Dinas.
- c) Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan daerah dibidang pekerjaan umum bina marga dan pengelolaan sumber daya air.
- d) Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan.
- e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- f) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemerintah kota dan instansi serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2) Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta mengkoordinasikan penyusunan program. Sekretaris Dinas juga mempunyai fungsi:

- a) Menyusun kebijakan teknis dibidang ketatausahaan..
- b) Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan.
- c) Mengelola urusan keuangan.
- d) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- e) Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- f) Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang tertentu.

Sekretaris Dinas terdiri dari:

a) Kasubbag Umum

Kasubag umum mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi surat-menyurat, kersipan dan kepustakaan. Kasubbag umum juga mempunyai fungsi:

- (1) menyusun rencana program kerja dan sub bagian umum
- (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf
- (3) Menyelenggarakan urusan administrasi surat menyurat
- (4) Mengelola arsip dinas

(5) Melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan kendaraan Dinas.

(6) Melaksanakan urusan perjalanan Dinas

b) Kasubbag Kepegawaian

Kasubbag kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan. Kasubag kepegawaian juga mempunyai fungsi:

(1) Menyusun rencana kerja dan program kerja kepegawaian.

(2) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian

(3) Pelaksanaan kegiatan penghimpun bahan-bahan dan penyusunan konsep rancangan program kerja

(4) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dan kearsipan

(5) Monitoring dan evaluasi dan pelaporan

c) Kasubbag Keuangan

Kasubbag keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran tahunan Dinas, pengelolaan dan pengendalian keuangan. Kasubbag keuangan juga mempunyai fungsi:

- (1) Menyusun rancangan program kerja dan kegiatan sub bagian keuangan
- (2) menyusun rencana anggaran kerja dinas
- (3) membuat estimasi tahun bersangkutan baik pengeluaran anggaran maupun penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan retribusi.
- (4) Mengikuti perkembangan pelaksanaan anggaran rutin maupun anggaran pembangunan.
- (5) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
- (6) Penyelenggaraan administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas

3) Bidang Perencanaan

Bidang perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perencanaan teknis, menyusun program dan pelaporan, menyelenggarakan fungsi pengujian dan jasa konstruksi.

Bidang perencanaan juga mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan.
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk dibidang perencanaan
- c) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang perencanaan.
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang perencanaan.

Bidang ini terdiri dari:

a) Kasi Program dan Pelaporan

Seksi program dan pelaporan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan dalam menyusun program dan pelaporan kinerja dinas. Seksi program dan pelaporan mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang program dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang program dan pelaporan.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang program dan pelaporan.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang program dan pelaporan.
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b) Kasi Pengujian dan Jasa Kontruksi

Seksi pengujian dan jasa kontruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biang perencanaan meliputi pengujian mutu dan penerbitan jasa kontruksi. Kasi pengujian dan jasa kontruksi mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengujian dan jasa kontruksi.
- (2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengujian dan jasa kontruksi.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang pegujian dan jasa komtruksi.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pengujian dan jasa kontruksi.
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

c) Kasi Leger dan Tata Teknik

Seksi leger dan tata teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dibidang perencanaan meliputi kegiatan menghimpun leger dan tata teknik sektor bina marga

dan sumber daya air. Kasi leger dan dan tata teknik mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program dan dan petunjuk teknis dibidang leger dan tata teknik
- (2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang leger dan tata teknik.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang leger dan tata teknik.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lain dibidang leger dan tata teknik.
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan

Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan, pengelolaan alat-alat dan perbekalan serta pembinaan dan pengawasan teknik kebinamargaan. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang kebinamargaan.
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk dibidang kebinamargaan.
- c) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang kebinamargaan.
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang kebinamargaan.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang ini juga terdiri dari:

- a) Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan

Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan melaksanakan sebagian tugas bidang kebinamargaan meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan juga mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program dan dan petunjuk teknis dibidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan.
- (2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan.

- (3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lain dibidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan.
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

b) Kasi Alkal Kebinamargaan

Kasi Alkal Kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dibidang kebinamargaan meliputi kegiatan penyiapan pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan alat-alat besar dan pembekalan milik kebinamargaan. Kasi Alkal Kebinamargaan mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang alkal kebinamargaan.
- (2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang alkal kebinamargaan.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang alkal kebinamargaan.

- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang alkal kebinamargaan.
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

c) Kasi Pembinaan teknis kebinamargaan.

Kasi pembinaan teknis kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang kebinamargaan meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis disektor kebinamargaan. Kasi pembinaan teknis kebinamargaan mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembinaan teknis kebinamargaan.
- (2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pembinaan teknis kebinamargaan.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang pembinaan teknis kebinamargaan.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pembinaan teknis kebinamargaan.
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

5) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air, pengelolaan alkal sumber daya air serta pemanfaatan sungai dan rawa. Bidang pengelolaan sumber daya air mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan sumber daya air.
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk dibidang pengelolaan sumber daya air.
- c) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang. pengelolaan sumber daya air.
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pengelolaan sumber daya air.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang ini juga terdiri dari:

a) Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan SDA

Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan SDA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air. Kasi pembangunan dan pemeliharaan SDA mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan dan pemeliharaan SDA.
- 2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan dan pemeliharaan SDA.
- 3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang pembangunan dan pemeliharaan SDA.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pembangunan dan pemeliharaan SDA.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

b) Kasi Alkal Sumber Daya Air

Kasi alkal sumber daya air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan akal untuk sumber daya air. Kasi alkal sumber daya air mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang alkal sumber daya air.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang alkal sumber daya air.
- c. Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang alkal sumber daya air.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang alkal sumber daya air.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

c) Kasi Pemanfaatan Sungai dan Rawa

Kasi Pemanfaatan Sungai dan Rawa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan pemanfaatan sungai dan rawa. Kasi pemanfaatan sungai dan rawa mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pemanfaatan sungai dan rawa.
- (2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pemanfaatan sungai dan rawa.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang pemanfaatan sungai dan rawa.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pemanfaatan sungai dan rawa.
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

6) Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase

Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan, pengelolaan alkal, pengendalian banjir dan drainase serta pembinaan dan pengawasan pengendalian banjir dan drainase.

Bidang pengendalian banjir dan drainase mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengendalian banjir dan drainase .
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk dibidang pengendalian banjir dan drainase .

- c) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang. pengendalian banjir dan drainase .
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pengendalian banjir dan drainase .
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang juga terdiri dari:

- a) Kasi Alkal Pengendalian Banjir dan Drainase

Kasi Pengendalian Banjir dan Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan, pengelolaan alkal, pengendalian banjir dan drainase serta pembinaan dan pengawasan pengendalian banjir dan drainase. Kasi pengendalian banjir dan drainase mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pemanfaatan sungai dan rawa.
- (2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pemanfaatan sungai dan rawa.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang pemanfaatan sungai dan rawa.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pemanfaatan sungai dan rawa.
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

b) Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Banjir dan Drainase

Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Banjir dan Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian banjir dan drainase meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan drainase. Kasi pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.
- (2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.

- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

c) Kasi Bintek Pengendalian Banjir dan Drainase

Kasi Bintek Pengendalian Banjir dan Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian banjir dan drainase meliputi kegiatan bimbingan teknis dan pengawasan pengendalian banjir dan drainase. Kasi bintek pengendalian banjir dan drainase mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.
- (2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini adalah mengenai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan anggaran untuk menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang dengan *Value For Money* rasio ekonomis, efisiensi dan efektifitas terhadap pelaksanaan anggaran belanja yaitu dengan tingkat ekonomis, efisien, dan efektivitas dan data tahun 2012 -2014

Tabel IV.1
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan PSDA Kota Palembang
Untuk tahun 2012 sampai dengan 2014

Tahun	Belanja	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	103.338.311.106,74	92.068.325.843
2013	271.146.845.846	255.145.885.601
2014	247.447.150.258,68	225.618.178.845

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, 2016

Tabel IV.2
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan PSDA Kota Palembang
Untuk tahun 2012 sampai dengan 2014

Keterangan	Anggaran	Realisasi
Tahun 2012		
BELANJA TIDAK LANGSUNG:		
Belanja Pegawai	3.925.454.000	3.817.209.256
BELANJA LANGSUNG:		
Belanja pegawai	1.627.830.004	1.341.816.000
Belanja barang dan jasa	17.060.778.102,74	15.724.690.277
Belanja Modal	180.724.249.000	71.184.610.310
Tahun 2012		
Belanja Tidak langsung:		
Belanja Pegawai	5.819.139.350	5.268.478.355
Belanja Langsung:		
Belanja pegawai	1.085.440.000	497.796.500
Belanja barang dan jasa	22.383.149.900	20.399.268.568
Belanja Modal	241.859.116.590	228.980.342.178
Tahun 2012		
Belanja Tidak langsung:		
Belanja Pegawai	5.834.707.000	5.726.879.813
Belanja Langsung		
Belanja pegawai	1.596.360.575	536.720.575
Belanja barang dan jasa	35.803.682.371	32.133.381.157
Belanja Modal	204.212.400.312	187.221.197.300

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, 2016

1. Analisis Ekonomi Pelaksanaan Anggaran Belanja

Pengukuran ekonomis menekankan pada input atau biaya. Mengukur tingkat ekonomis yaitu dengan membandingkan antara biaya pengeluaran yang dianggarkan dengan realisasi biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya. Ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan dan juga mencakup pengelolaan secara hati-

hati dan cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tolak ukur yang digunakan adalah anggaran dan realisasi sesuai dengan indikator ekonomis yaitu membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran.

Apabila perbandingan realisasi dan biaya anggaran lebih kecil dari 100% maka dapat dikatakan anggaran cukup ekonomis. Apabila realisasi biaya dan anggaran adalah sama dengan 100% maka berimbang dan jika realisasi biaya dan anggaran lebih dari 100% maka dikatakan anggaran belum ekonomis.

Perhitungan nilai ekonomis berdasarkan data dari laporan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun 2012 sampai dengan 2014. Rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Rumus di atas dapat dilakukan untuk menganalisis tingkat ekonomis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang.

a. Tahun 2012

Target pengeluaran biaya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air kota Palembang tahun anggaran 2012 sebesar Rp 103.338.311.106,74 dan realisasi sebesar Rp. 92.068.325.843 Maka tingkat ekonomi untuk tahun 2012 adalah:

$$\text{Tingkat Ekonomis} = \frac{92.068.325.843}{103.338.311.106,74} \times 100\% = 89,09\%$$

Pada tahun 2012 tingkat ekonomi pelaksanaan anggaran belanja Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang adalah 89,09%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang sudah ekonomi dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio ekonomi <100%.

Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2012 menunjukkan kinerja yang sangat baik yaitu anggaran belanja yang diterima sebesar Rp 103.338.311.106,74 yang mana terdiri dari belanja langsung, lebih besar daripada realisasi belanja sebesar Rp. 92.068.325.843 . Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja langsung

Unsur belanja langsung yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja modal sebesar 80.724.249.000. Dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja

langsung, karena belanja langsung pada tahun 2012 . Unsur belanja langsung yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja modal sebesar Rp 71.184.610.310.

Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja sesuai target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.

b. Tahun 2013

Target pengeluaran biaya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun anggaran 2013 sebesar Rp 271.146.845.846 dan realisasi sebesar Rp 255.145.885.601. Maka tingkat ekonomi untuk tahun 2013 adalah:

$$\text{Tingkat Ekonomis} = \frac{255.145.885.601}{271.146.845.846} \times 100\% = 94,01\%$$

Pada tahun 2013 tingkat ekonomi pelaksanaan anggaran belanja Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang adalah 94,01%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang sudah ekonomi dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio ekonomi <100%.

Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2013 menunjukkan kinerja yang sangat baik yaitu anggaran belanja yang diterima sebesar Rp

271.146.845.846 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal lebih besar daripada realisasi belanja sebesar Rp 255.145.885.601 yang terdiri dari belanja langsung, belanja tidak langsung

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2013. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar . Dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja langsung pada tahun 2013 sebesar Rp 265.327.706.490. Unsur belanja langsung yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja modal sebesar Rp. 228.980.342.178.

Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja sesuai target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.

c. Tahun 2014

Target pengeluaran biaya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun anggaran 2014 sebesar Rp 247.447.150.258,68 dan realisasi sebesar Rp 225.618.178.845. maka tingkat ekonomi untuk tahun 2014 adalah:

$$\text{Tingkat ekonomis} = \frac{225.618.178.845}{247.447.150.258,68} \times 100\% = 91,18\%$$

Palembang adalah 91,18%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang sudah ekonomi dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio ekonomi <100%.

Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2014 menunjukkan kinerja yang sangat baik yaitu anggaran belanja yang diterima sebesar Rp 247.447.150.258,68 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal lebih besar daripada realisasi belanja sebesar Rp 225.618.178.845 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal.

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2014 sebesar Rp. 241.612.443.258,68 Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja modal sebesar Rp. 204.212.400.312 Dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja langsung pada tahun 2014 sebesar Rp. 219.891.299.032. Unsur belanja langsung yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja modal sebesar Rp. 187.221.197.300

Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja sesuai target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.

Tabel IV.3
Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis Dinas PU Bina Marga dan PSDA Kota Palembang selama tahun 2012-2014

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	Tingkat Ekonomis	Standar	Keterangan
2012	103.338.311.106,74	92.068.325.843	89,09 %	X<100=Ekonomis	Ekonomis
2013	271.146.845.846	255.145.885.601	94,10%	X<100=Ekonomis	Ekonomis
2014	247.447.150.258,68	225.618.178.845	91,18%	X<100=Ekonomis	Ekonomis

Sumber : Data yang diolah, 2016

Berdasarkan tingkat ekonomi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, tingkat ekonomi anggaran belanja yang tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 94,01% dengan kriteria cukup ekonomi. Tahun 2013, realisasi belanja sebesar Rp 255.145.885.601 lebih kecil daripada anggaran belanja. Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Semua unsur belanja daerah tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.

Tingkat ekonomi anggaran belanja yang terendah yaitu pada tahun 2012 sebesar 89,09% dengan kriteria cukup ekonomi. Tahun 2012, realisasi belanja sebesar Rp 92.068.325.843 lebih kecil daripada anggaran belanja. Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari belanja

langsung dan tidak langsung. Semua unsur belanja daerah tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.

Dengan hasil perhitungan dari tahun ke tahun, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang cukup berhasil yang menunjukkan kinerja yang baik sesuai pendapat Mardiasmo (2002:31) yang menyatakan kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Semakin besar persentase ekonomi maka kinerja keuangan dinas semakin baik.

Artinya, . Dinas dinilai sudah bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja dengan cara yang sangat ekonomis misalnya menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif dan mengurangi biaya yang tidak diperlukan serta dalam hal pengadaan dan alokasi sumber daya dilakukan dengan sebaik-baiknya.

2. Tingkat Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa besar cara yang digunakan untuk membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (cost of output). Suatu kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tolak ukur yang

digunakan adalah anggaran dan realisasi penerimaan alokasi dana kegiatan. efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja. Apabila hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien. Apabila hasil pencapaian antara 90% - 100% maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien. Apabila hasil pencapaian antara 80% - 90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien. Apabila hasil pencapaian antara 60% - 80% maka anggaran belanja dikatakan efisien. Apabila hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien. Perhitungan nilai efisiensi berdasarkan data dari laporan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun 2012 sampai dengan 2014.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

a. Tahun 2012

Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 89.463.004.087 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 93.280.213.343

Maka rasio tingkat efisiensi untuk tahun 2012 adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{89.463.004.087}{93.280.213.343} \times 100\% = 95,90\%$$

Pada tahun 2012 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang adalah 95,90%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang efisien dalam pengelolaan anggaran belanja karena tingkat efisiensi 90-100%. Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2012 menunjukkan kinerja yang kurang baik dinilai belum bisa mengemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

Berkaitan dengan belanja, dikatakan efisien jika realisasi belanja tidak melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2012, belanja sebesar Rp. 89.463.004.087 lebih kecil daripada anggaran belanja sebesar Rp 93.280.213.343.

Unsur-unsur belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung seperti belanja pegawai. Untuk belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Semua unsur belanja daerah realisasinya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja sesuai target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti

apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.

b. Tahun 2013

Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 249.877.407.246 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 255.145.885.601

Maka rasio tingkat efisiensi untuk tahun 2013 adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{249.877.407.246}{255.145.885.601} \times 100\% = 97,93\%$$

Pada tahun 2013 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang adalah 97,93%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang efisien dalam pengelolaan anggaran belanja karena tingkat efisiensi 90-100%. Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2013 menunjukkan kinerja yang kurang baik dinilai belum bisa mengemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

Berkaitan dengan belanja, dikatakan efisien jika realisasi belanja tidak melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Untuk tahun 2013, belanja sebesar Rp. 249.877.407.246 lebih kecil daripada anggaran belanja sebesar Rp 255.145.885.601.

Unsur-unsur belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung seperti belanja pegawai. Untuk belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Semua unsur belanja daerah realisasinya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja sesuai target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.

c. Tahun 2014

Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 219.891.299.032 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 255.618.178.845

Maka rasio tingkat efisiensi untuk tahun 2014 adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{219.891.299.032}{255.618.178.845} \times 100\% = 97,46\%$$

Pada tahun 2014 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang adalah 97,46%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang efisien dalam pengelolaan anggaran belanja karena tingkat efisiensi 90-100%. Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2014 menunjukkan kinerja yang kurang baik dinilai belum bisa mengemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

Berkaitan dengan belanja, dikatakan efisien jika realisasi belanja tidak melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2014, belanja sebesar Rp. 219.891.299.032 lebih kecil daripada anggaran belanja sebesar Rp 255.618.178.845.

Unsur-unsur belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung seperti belanja pegawai. Untuk belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Semua unsur belanja daerah realisasinya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja sesuai target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.

Tabel IV.4
Pengukuran Tingkat Efisiensi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
PSDA Kota Palembang selama Tahun 2012 sampai 2014

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi anggaran belanja	Tingkat Efisiensi	Keterangan
2012	89.463.004.087	93.280.213.343	95,90%	Kurang Efisien
2013	249.877.407.246	255.145.885.601	97,93%	Kurang Efisien
2014	219.891.299.032	255.618.178.845	97,46%	Kurang Efisien

Sumber: penulis, 2016

Berdasarkan tingkat efisiensi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, tingkat efisiensi anggaran belanja yang tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 97,93% dengan kriteria kurang efisien. Tahun 2013, realisasi belanja sebesar Rp 249.877.407 lebih kecil daripada anggaran belanja daerah Rp 255.145.885.601. Unsur-unsur belanja daerah tersebut terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Semua unsur belanja daerah tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.

Tingkat efisiensi anggran belanja yang terendah yaitu pada tahun 2012 sebesar 95,90% dengan kriteria cukup ekonomi. Tahun 2012, realisasi belanja sebesar Rp 89.463.004.087 lebih kecil daripada anggaran belanja Rp 89.463.004.087. Unsur-unsur belanja daerah tersebut terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Semua unsur belanja daerah tidak melebihi anggran yang ditetapkan.

Dengan hasil perhitungan dari tahun ke tahun, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumer Daya Air belum

berhasil menunjukkan kinerja yang baik. Dinas dinilai belum bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja. Hasil pengukuran kinerjanya menunjukkan kriteria kurang efisien.

3. Tingkat Efektivitas

Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang dalam pelaksanaan anggaran belanja tolak ukur yang digunakan adalah Efektivitas (hasil guna) adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas yang telah dicapai oleh manajemen yang ditentukan sebelumnya. Efektivitas anggaran dapat diukur dengan rasio antara relisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja. keberhasilan suatu organisasi usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output, Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tolak ukur yang digunakan adalah rasio antara relisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja

Apabila hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif. Apabila hasil pencapaian antara 90% - 100% maka anggaran belanja dikatakan efektif. Apabila hasil pencapaian antara 80% - 90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif. Apabila hasil pencapaian antara 60% - 80% maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif. Apabila hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran belanja dengan realisasinya dikali 100%. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target Anggaran Belsnja}} \times 100\%$$

Perhitungan ini berdasarkan data dari laporan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 setiap tahunnya sebagai berikut:

a. Tahun 2012

Realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 442.654.362.000 dan target anggaran belanja sebesar Rp. 828.753.112.000

Maka rasio tingkat efektivitas untuk tahun 2012 adalah:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{442.654.362.000}{828.753.112.000} \times 100\% = 53,41 \%$$

Pada tahun 2012 tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang adalah 53,41 %. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang

efektif dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio efektifitasnya <60%.

Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2012 dinilai kurang baik dalam menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja. Berkaitan dengan belanja, dikatakan efektif jika realisasi belanja tidak melebihi umlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2012, realisasi belanja daerah sebesar Rp. 442.654.362 lebih kecil daripada anggaran belanja daerah sebesar Rp. 828.753.112.

Apabila dinas berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja itu lebih kecil daripada anggaran belanja yang diterimanya.

b. Tahun 2013

Realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 255.145.885.601 dan target anggaran belanja sebesar Rp. 271. 146.845.840

Maka rasio tingkat efektivitas untuk tahun 2013 adalah:

$$\text{Tingkat efektivitas} = \frac{255.145.885.601}{271.146.845.840} \times 100\% = 49,67\%$$

Pada tahun 2013 tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang adalah 49,67%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang efektif dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio efektifitasnya <60%.

Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2013 dinilai kurang baik dalam menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja. Berkaitan dengan belanja, dikatakan efektif jika realisasi belanja tidak melebihi umlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2012, realisasi belanja daerah sebesar Rp. 255.145.885.601 lebih kecil daripada anggaran belanja daerah sebesar Rp. 271.146.845.840.

Apabila dinas berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja itu lebih kecil daripada anggaran belanja yang diterimanya.

c. Tahun 2014

Realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 108.228.650.000 dan target anggaran belanja sebesar Rp. 187.221.197.300

Maka rasio tingkat efektivitas untuk tahun 2014 adalah:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{108.228.650.000}{187.221.197.300} \times 100\% = 57,80\%$$

Pada tahun 2014 tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang adalah 57,80%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang efektif dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio efektifitasnya <60%.

Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2014 dinilai kurang baik dalam menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja. Berkaitan dengan belanja, dikatakan efektif jika realisasi belanja tidak melebihi umlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2014, realisasi belanja daerah sebesar Rp. 108.228.650.000 lebih kecil daripada anggaran belaja daerah sebesar Rp. 187.221.197.300 yang mana terdiri dari .

Apabila dinas berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja itu lebih kecil daripada anggaran belanja yang diterimanya.

Tabel IV.5
Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Dinas PU Bina Marga dan PSDA selama tahun 2012 sampai 2014

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2012	828.753.112.000	442.654.362.000	53,41 %	Tidak Efektif
2013	271.146.845.840	255.145.885.601	49,67%	Tidak Efektif
2014	187.221.197.300	108.228.650.000	57,80%	Tidak Efektif

Sumber : data yang diolah, 2016

Berdasarkan tingkat efektifitas yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, tingkat efektif anggaran belanja yang tertinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 57,80% dengan kriteria kurang efisien. Tahun 2013, realisasi belanja Rp 108.228.650.000 sebesar lebih kecil daripada anggaran belanja sebesar Rp 271.146.845.840. realiasi anggaran yang dicapai masih cukup jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran belanja.

Tingkat efektif anggaran belanja yang terendah yaitu pada tahun 2013 sebesar 49,67% dengan kriteria cukup ekonomi. Tahun 2012, realisasi belanja sebesar Rp 255.145.885.601 lebih kecil daripada anggaran belanja Rp 828.753.112.000. realiasi anggaran yang dicapai masih cukup jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran belanja.

Dengan hasil perhitungan dari tahun ke tahun, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumer Daya Air belum

berhasil menunjukkan kinerja yang baik. Dinas dinilai belum bisa memaksimalkan pengelolaan anggaran belanja. Hasil pengukuran kinerjanya menunjukkan kriteria kurang efektif.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang mengatakan bahwa anggaran yang cukup jauh perbedaannya dengan terget yang diharapkan disebabkan adanya kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan pada Tabel IV.4 menunjukkan bahwa rincian realisasi anggaran tidak mendapatkan pencapaian yang maksimal. Kegiatan itu meliputi program pembagunan jalan dan jembatan serta program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembuatan saluran air

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian kasubag keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaaan Sumber Daya Air Kota Palembang diatas dapat dilihat bahwa masih ada anggaran yang belum terealisasi dikarenakan waktu yang singkat dan cuaca sehingga banyak belanja yang tidak bisa dilaksanakan.

BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan setelah dilakukan analisis hasil pembahasan dan uraian pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang dalam pelaksanaan anggaran belanja tahun 2012-2014 bila diukur dengan *value for money* belum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi yang berdasarkan visi dan misi. Dikarenakan kegiatan yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang belum dapat dikatakan Efisien dan Efektif, bahwa pengeluaran anggaran belanja yang begitu besar terhadap aktivitas kegiatan tersebut, belum memberikan kontribusi yang besar dalam peneingkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil perhitungan ekonomis pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun 2012-2014 sudah ekonomi. Hasil perhitungan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun 2012-2014 kurang efisien. Hasil perhitungan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun 2012-2014 kurang efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti membeikan saran agar dapat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan anggaran belanja sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien, maka yang harus dilakukan adalah pemahaman konsep belanja,. Dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan anggaran belanja diarahkan pada program yang didukung dengan pembangunan infrastruktur .
2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air agar lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja ditahun-tahun selanjutnya, dan dilakukan evaluasi agar bisa menilai kinerja yang dilakukan dalam tiap tahunnya.
3. Pengukuran ini hanya berdasarkan aspek kuantitas. Hal ini merupakan keterbatasan dalam peneitian ini. Oleh karena itu

diharapkan adanya pengembangan penelitian kedepan dengan model pengukuran yang mempertimbangkan aspek kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz. (2009). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta
Penerbit: Salemba Empat.
- Ariel Sharon Sumenge. (2013). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Minahasa Selatan. (*Jurnal EMBA*). Vol. 1(3), H(74-81.)
(<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/1941/1538>)
diakses 7 april 2015
- Basri dan Rivai. (2007) *Analisis Sektor Publik Indonesia*. Edisi ketiga. Penerbit : BPFY Yogyakarta.
- Deddi Nordiawan & Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga
Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Semarang . PT Gramedia.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Haryanto. (2007). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFY.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mudrajad Kuncoro. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Rusita untari. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung dinas pendidikan kota semarang.

(http://Journal.dinus.ac.id/17224/1/jurnal_16081.pdf) diakses pada tanggal 7 april 2015

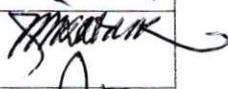
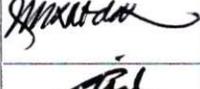
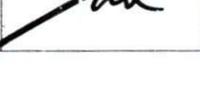
Tri.(2007). *Penerapan Value For Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*.Jurnal(<http://Journal.wima.ac.id.index.php/JIMA/article/download2553/24>) diakses 7 april 2015

Umar Husein. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : 19 Agustus 2016
Pukul : 08.00 – 17.00 WIB
Nama : Zakia Arisandi
NIM : 22 2012 077
Program Studi : Akuntansi
Bidang Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan *Value For Money* Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang.

TELAH MEMPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH PIHAK TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

No	Nama Dosen	Jabatan	Tgl. Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA	Pembimbing	9-9-2016	
2.	Betri Sirajudin, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Penguji	9-9-2016	
3.	Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA	Penguji 1	8-9-2016	
4.	Sunardi, S.E., M.Si	Penguji 2	8-9-2016	

Palembang, September 2016
Dekan,
u.b. Ketua Program Studi
Akuntansi



Betri Sirajudin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN : 0216106902/944806



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Slamet Riady No. 213 Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 710033 - 710305 Fax. (0711) 710033 Website : www.dpubmpsda.palembang.go.id

Palembang, 19 Februari 2016.

nomor : 600/0448/DPU.BM-PSDA/2016.
tipe : Biasa.
inspirasi : -
tujuan : Mohon Izin Penelitian.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang
di-
P a l e m b a n g.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 2102/H-5/FEB-Ump/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima yang tersebut dibawah ini :

Nama : Zakia Arisandi.
NIM : 22 2012 077
Program Studi : Akuntansi.

Untuk mendapatkan data yang di inginkan, agar yang bersangkutan melapor kepada Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan PSDA Kota Palembang.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

an. Kepala Dinas PU Bina Marga
dan PSDA Kota Palembang.
Sekretaris,

Ir. Bambang Irawan, MT.
Nip. 196504191995031001.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

AMA MAHASISWA : Zakia Arisandi	PEMBIMBING
IM : 22 2012 077	KETUA Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA
ROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja dengan Value For Money pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang	

O.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	6/3 2016	Pemb I 8/2 III			Acc layout
2					Pemb IV
3	7/3 2016	Pemb IV			perbaiki sesuai dgn email
4					
5	8/3 2016	Pemb IV			perbaiki lagi kontrol ke adit
6					perbaikan
7					
8					
9	11/3 2016	Pemb IV & V			perbaiki sesuai email
10					
11					
12	12/3 2016	Skripsi			Acc
13					
14					
15					
16					

PETUNJUK :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : 12 / 03 / 2016
 a.n. Dekan
 Program Studi

Rosalina Ghazali, S.E, Ak, M.Si





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Zakia Arisandi
Place/Date of Birth : Palembang, March 20th 1993
Test Times Taken : +1
Test Date : February, 4th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 46
Structure Grammar : 39
Reading Comprehension : 38
OVERALL SCORE : 410

Palembang, February, 11th 2016

Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

No. 089/TEA FE/LB/UMP/II/2016

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami

526/J-10/FEB-UMP/SHA/X/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : ZAKIA ARISANDI
NIM : 222012077
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ (26)** Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 01 Oktober 2015
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Brs. Antoni, M.H.I.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIA G A M

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : ZAKIA ARISANDI
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012077
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : PALEMBANG, 20-03-1993

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Kenten
Kecamatan : Talang Kelapa
Kota/Kabupaten : Banyuasin
Dinyatakan : Lulus



Mengetahui

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 30 September 2015
Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.

BIODATA PENULIS

Nama : Zakia Arisandi
NIM : 22 2012 077
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 20 Maret 1993
Alamat : Jl. Tanjung sari 1 rt: 29 no:101 kelurahan bukit
Sangkal kecamatan: kalidoni Kenten Palembang
No. HP : 085383935080
Nama Orang Tua
Ayah : Hasan Zaini
Ibu : Harus Fadillah

NO	RIWAYAT PENDIDIKAN	ALUMNI
1	SD	SDN 244 Palembang
2	SMP	SMPN 38 Palembang
3	SMA	SMAN 10 Palembang

Palembang, Maret 2016

Penulis,

(Zakia Arisandi)